

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan adalah (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian. Proses pendidikan akan terganggu bila salah satu komponen tersebut tidak tersedia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2017). Salah satu komponen tersebut adalah sarana dan prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Suatu kejadian yang mesti dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan (Bafadhal, 2008:17).

Guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan perlu disusun perencanaan sebagai proses pemikiran dan penetapan program pengadaan fasilitas yang ada sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Selain perencanaan yang baik, pelaksanaannya pun harus dikelola dengan baik pula, mulai dari pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan pengapusan, dilakukan pengawasan secara berkala. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian dari manajemen yang ada di lembaga pendidikan, sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, institusi ataupun lembaga pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Hamiyah dan Mohammad Jauhar (2015:44) proses pendidikan memang memerlukan fasilitas atau peralatan, tetapi semua fasilitas atau peralatan perlu diadakan sesuai dengan kebutuhan. Jika fasilitas itu sudah diadakan, harus dimanfaatkan melalui proses yang optimal. Dalam sistem pendidikan, proses sama pentingnya dengan masukan instrumental dan masukan lingkungan. Semuanya akan menjadi penentu dalam mencapai keluaran (*out put*) dan hasil pembelajaran (*out come*).

Terkait dengan hal di atas, manajemen sarana dan prasarana mutlak harus diadakan dalam proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pembelajaran. Agar semua fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran, maka fasilitas tersebut hendaknya dikelola dengan baik.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pembelajaran, baik oleh guru sebagai pengajar, maupun murid-murid sebagai pelajar.

Hikmat (2011:61) menyatakan proses belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Sebab setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pasti memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan adanya dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulisan dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh guru.

Oleh sebab itu guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam

membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran sarana pembelajaran harus dikembangkan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila didukung salah satunya oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu guru dalam menyajikan materi pembelajaran sehingga nantinya mudah dimengerti oleh siswa. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran penjas tidak akan terlepas dari sarana, dan prasarana kegiatan olahraga seperti peralatan, perlengkapan dan lapangan olahraga.

Sarana dan prasarana olahraga adalah bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan. Tapi realitanya sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pendidikan masih belum memadai. Prosedur penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang selama ini hanya sebatas pengadaan dan distribusi saja. Sementara untuk penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, serta pengawasan belum dilakukan. Selain itu, penetapan jenis sarana dan prasarana keolahragaan belum memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Prosedur seperti itu tentunya perlu dilakukan perbaikan. Di Kabupaten Sintang ketersediaan sarana prasarana olahraga di lembaga pendidikan khususnya

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga masih belum memadai. Berdasarkan data Profil Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2018 ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruangan olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Berupa Ruangan Olahraga Pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Tempat Olahraga	%
1	SD	432	188	43,52 %
2	SMP	123	72	58,54 %
3	SMA	46	37	80,44 %
	Jumlah/Rata-Rata	601	297	49,42 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruangan olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 masih belum memadai. Salah satu penyebab rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruangan olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sintang tersebut, karena belum adanya kebijakan untuk pemakaian bersama antara beberapa sekolah untuk fasilitas olahraga dimaksud.

Selanjutnya untuk mengetahui Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Berupa Ruang Olahraga Pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Berupa Ruang Olahraga Pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Memiliki Tempat Olahraga	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	SD	188	96	53	39
2	SMP	72	41	19	12
3	SMA	37	19	10	8
	Jumlah	297	156	82	59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, 2018.

Idealnya, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruang olahraga adalah 100%, namun untuk jenjang pendidikan SD cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga hanya 43,52% sedangkan untuk SMP sebesar 58,54%. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (LAKIP) Tahun 2018, fenomena permasalahan terkait dengan masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 disebabkan antara lain:

1. Masih belum optimalnya pengelolaan program penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kecendrungan yang dilakukan selama ini adalah kegiatan dilakukan hanya sebatas pengadaan dan distribusi saja. Sementara untuk penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, serta pengawasan belum dilakukan.
2. Penetapan jenis sarana dan prasarana keolahragaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang belum memperhatikan kondisi lingkungan sekolah, sehingga banyak sarana dan prasarana keolahragaan justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau justru tidak dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan.
3. Terdapat pula fenomena bantuan dana dari pemerintah tidak dipergunakan oleh pihak sekolah untuk menyediakan atau membangun sarana dan prasarana keolahragaan. Hal ini disebabkan: (a) kurang perhatian siswa terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang ada; (b) kurangnya modifikasi guru terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani; dan (c) kondisi lingkungan sekolah yang tidak memadai untuk dibangun fasilitas olahraga. (LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada

Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilakukan pada SD Negeri 7 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila didukung salah satunya oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu guru dalam menyajikan materi pembelajaran sehingga nantinya mudah dimengerti oleh siswa. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran penjas tidak akan terlepas dari sarana, dan prasarana kegiatan olahraga seperti peralatan, perlengkapan dan lapangan olahraga. Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sintang masih menghadapi permasalahan. Sehubungan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang. Dari rumusan masalah tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang?

2. Bagaimanakah tingkat kecukupan dan pemerataan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang?
3. Bagaimanakah responsivitas kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang?
4. Bagaimanakah ketepatan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang
2. Untuk menganalisis tingkat kecukupan dan pemerataan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang
3. Untuk menganalisis responsivitas kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang

4. Untuk menganalisis ketepatan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah studi kebijakan dalam disiplin Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan bidang manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan sekolah terhadap program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Dwiyanto (2009: 18): Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. Menurut Nugroho (2003: 51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan

sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara menurut Ali dan Syamsu Alam (2012: 13): Definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal yaitu. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses *decision making* (pengambilan keputusan). Kedua kebijakan publik sebagai proses manajerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi

dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Wahab (2004: 6-7), kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan,
- b. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencangkup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya,
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit,
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencangkup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah lebih merupakan tindakan yang direncanakan, saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu serta diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

Menurut Dwiyanto (2009: 59) Masalah publik yaitu masalah yang melibatkan seluruh orang lain dan penyelesaiannya dapat mempengaruhi pihak secara luas, termasuk negara. Untuk menyelesaikan masalah publik tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah. Dan kebijakan tersebut nantinya

diharapkan mampu mengatasi masalah publik tersebut. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah publik dan membuat kebijakan juga diperlukan barang publik. Menurut Dwiyanto (2009: 59), konsep barang publik memiliki dua karakteristik utama yaitu sifat *non rivalry* (tidak terdapat kompetisi) dan sifat *non-excludability* (tidak dapat menafikkan), sehingga dengan adanya karakteristik tersebut, barang-barang tersebut tidak bersifat khusus atau eksklusif, dan semua orang dapat menikmati barang tersebut tanpa terkecuali. Tetapi karena dapat diakses oleh siapapun, penggunaan barang pun menjadi berlebihan sehingga cepat rusak. Barang swasta juga penting untuk mendudukkan masalah publik dalam rangka urusan dan kepentingan publik. Barang swasta menggunakan prinsip *excludability* (dapat menafikkan) dan *rivalry* (kompetisi), karena semua orang dapat menafikkan keberadaan barang tersebut dalam artian semua orang berhak mendapatkan barang tersebut maka dengan sifat barang swasta yang terbatas menyebabkan adanya persaingan dan kompetisi bagi orang-orang tersebut. Selain itu, harga barang privat dapat ditentukan dengan mudah oleh mekanisme pasar antara produsen dan konsumen. Barang publik merupakan barang yang dikonsumsi oleh banyak orang secara bersama dan produsennya bisa melakukan pencegahan terhadap pihak lain untuk mengkonsumsinya. Sedangkan barang terbuka untuk umum yaitu barang yang digunakan oleh perseorangan tapi pencegahan tidak mungkin dilakukan oleh penyelenggaranya.

Menurut Dwiyanto (2009: 59), masalah publik harus diatasi dengan melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pencarian masalah. Yaitu suatu tahap mengenali akar masalah. *Dikarenakan masalah publik melibatkan banyak pihak, maka pemerintah perlu menilik secara serius apa sebenarnya persamasalahannya*
- b. Pendefinisian masalah. Yaitu merangkum permasalahan yang dikemukakan oleh berbagai pihak menjadi satu permasalahan formal.
- c. Spesifikasi masalah. Setelah merangkum seluruh permasalahan, langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan karakteristik masalah dan sumber daya yang dimiliki.
- d. Agenda pemerintah. Setelah ditetapkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah ditetapkan menjadi agenda pemerintah dan segera dibentuk kebijakan yang nantinya akan menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan pendapat di atas, masalah kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah harus diatasi dengan melakukan beberapa langkah, antara lain pencarian masalah, yaitu pemerintah perlu menilik secara serius apa sebenarnya persamasalahannya, merangkum permasalahan yang dikemukakan oleh berbagai pihak menjadi satu permasalahan formal, mempertimbangkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan karakteristik masalah dan sumber daya yang dimiliki, serta menyusun agenda kebijakan yang nantinya akan menyelesaikan masalah terkait Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Dwiyanto (2009: 140): Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan

kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai *representative publik*. Jika lembaga politik yang representative dari kebijakan benar-benar menampung aspirasi publik, maka kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk dilegitimasikan menjadi sebuah kebijakan. Selanjutnya menurut Dwiyanto (2009: 141-145), proses politik kebijakan publik meliputi:

- a. Pernyataan Kebijakan, adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait dengan masalah publik tertentu. Setiap pernyataan kebijakan tersebut harus sudah mendapatkan pernyataan legitimasi dari pihak hukum. Pernyataan kebijakan harus diketahui oleh publik dengan sebaik-baiknya, sehingga dibutuhkan proses sosialisasi secara detail.
- b. Implementasi Kebijakan, adalah menunjuk kepada apakah kebijakan yang disusun tersebut dilaksanakan seperti yang telah direncanakan, apakah benar-benar teraplikasi di lapangan dan apakah benar-benar mampu mengatasi masalah publik
- c. Evaluasi Kebijakan, yaitu menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dan apabila kebijakan tersebut dinyatakan gagal mengatasi permasalahan publik, maka nantinya akan dibuat kebijakan yang baru lagi dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Inilah yang disebut dengan analisis kebijakan yang dinamis.

Menurut Dunn (2000: 24), dalam tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
- b. Formulasi kebijakan yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-

simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. **Penilaian/ Evaluasi Kebijakan** yaitu sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektipan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan **dicapai serta** untuk melihat **sejauhmana kesenjangan** antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Anderson (dalam Winarno, 2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih

membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

- c. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penelitian ini merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan efisiensi dalam melaksanakan program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut *model evaluatif*, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah lebih kepada model retrospektif yaitu analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah diimplementasikan.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2008: 171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik

- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat di atas, dimensi evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup pula, dampak kebijakan pada masalah-masalah pendidikan dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat di sekolah, keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan pendidikan, keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang serta biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Menurut Winarno (2008: 171-174) pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan yaitu menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Selain itu, berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi serta berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut Dunn (2000:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga

harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, komponen evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat (guru/siswa) serta seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. Selain itu, juga mencakup tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai fungsi

antara lain eksplanasi yaitu realitas pelaksanaan program dan mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program. Fungsi kepatuhan yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Fungsi audit, yaitu apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Fungsi akunting yaitu akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Subarsono (2005:60): Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi dan Freeman (dalam Dunn, 2000: 36): Mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang di keluarkan

serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

Menurut Dunn (2000:610) mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut Winarno (2008:184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

b. Efisiensi

Menurut Winarno (2008:185): Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang

dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2008:186) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Menurut Winarno (2008: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Menurut Winarno (2008: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu pemerataan.
- d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

e. Responsivitas

Menurut Winarno (2008: 189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Menurut Winarno (2008:184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang

direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

3. Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan. (Sudarwan, 2017:193). Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar., teratur, efektif, dan efisien.

Sedangkan Daryanto (2001:51) mendefinisikan Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya Buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Seperti halaman, kebun, taman, dan sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga komponen tersebut yang menjadi sarana pendidikan.

Selanjutnya Sulistyorini (2009:115) menerangkan, manajemen sarana dan prasaran pendidikan sebagai suatu proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan. Senada dengan Hikmat (2011: 124) mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.

Secara sederhana dapat disimpulkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerja pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan secara efektif dan efisien.

Proses belajar mengajar (PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM) akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga pemerintahpun selalu berupaya untuk terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan, sehingga kekayaan fisik Negara berupa sarana dan prasarana pendidikan menjadi besar.

Menurut Gunawan (1996: 115-116) fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis atau sifatnya.

- a. Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalan, air, telepon, serta perabot/mebiler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media pendidikan.
- b. Ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik atau material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti: kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, model, media, dan sebagainya. Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang.

- c. Ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas.

Bafadal (2008:2) menerangkan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai suatu proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan. Sedangkan menurut Hamiyah (2015:26) manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.

Secara sederhana dapat disimpulkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Tujuan daripada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara professional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. berkaitan dengan hal ini. Bafadal (2003:5) menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.

- b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut Sulistyorini (2009:117) adalah:

- a. Prinsip mencapai tujuan, yaitu sarana prasarana pendidikan disekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sekolah.
- b. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana yang baik dengan pemakaian harus hati-hati agar tidak terjadi pemborosan.
- c. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan disekolah harus selalu memperhatikan peraturan, inruksi, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- d. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan disekolah harus didelegasikan kepada yang mampu tanggung jawab.
- e. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan disekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

Menurut Bafadal (2008:8) proses manajemen sarana prasarana itu meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan.

1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail. Proses berfikir dilakukan untuk menghindari kerugian

atau kegagalan. Dari segi pendidikan perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktifitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan (Bafadhal, 2006: 42). Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui semua unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangat menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan juga mempunyai arti pemulihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber meliputi sumber manusia, material, uang, dan waktu. (Suryabrata, 2004: 22).

Dalam perencanaan kita mengenal beberapa tahapan antara lain, identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pilihan alternatif, dan elaborasi alternatif. Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya dengan mengikut sertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan itu.

Pengikut sertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki (sense of belongin) yang dapat memberikan dorongan kepada gurudan personil sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil. Badrudin (2014:63)

mengartikan perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Bafadhal (2008:27) menjelaskan, ada beberapa karakteristik esensial perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu:

- a. Perencanaan merupakan proses menetapkan dan memikirkan.
- b. Objek pikir dalam perencanaan adalah upaya memenuhi sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah.
- c. Tujuan perencanaan adalah efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
- d. Perencanaan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip:
- e. Perencanaan harus betul-betul merupakan proses intelektual.
- f. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya serta prediksi populasi sekolah.
- g. Perencanaan harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran.
- h. Visualisasi perencanaan harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.

Dengan adanya perencanaan diharapkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik. Perencanaan sangat perlu sekali untuk dilakukan agar pengelolaan manajemen sarana pendidikan mempunyai acuan bagi pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara rinci

Sulistyorini (2009:120) mengemukakan bahwa ada beberapa langkah perencanaan sarana dan prasarana disekolah, yaitu :

- a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan setiap unit kerja sekolah dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu tahun ajaran.
- c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya.
- d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang telah tersedia.
- e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan dengan dana atau anggaran yang ada.
- f. Penetapan rencana pengadaan akhir.

Keefektifan suatu perencanaan tersebut dapat dinilai atau dilihat seberapa jauh pengadaannya itu dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah dalam periode tertentu. Jika dengan pengadaan tersebut semua kebutuhan sekolah akan sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi bisa dinilai bahwa perencanaan tersebut efektif. Tetapi jika ternyata jika pengadaan kebutuhan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau bahkan melebihi yang dibutuhkan maka perencanaan tidak efektif dan bersifat pemborosan. Oleh karena itu di dalam membuat

perencanaan diperlukan pemikiran dalam menetapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan.

2) Pengadaan

Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan perlengkapan sekolah harus didasari dengan kejujuran dan tanggung jawab di dalam merealisasikan kegiatan tersebut. Sehingga pengadaan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan peraturan sekolah yang sudah ditetapkan.

Menurut Bafadhal (2008:32) pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam perspektif ilmu pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembelian. Pembelian adalah suatu proses mendatangkan dan menukarnya dengan uang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari pabrik atau toko.
- b. Hadiah atau sumbangan. Ini sifatnya sukarelawan, siapa saja orang yang peduli terhadap sekolah bisa memberikan hadiah kepada sekolah untuk menambah sarana dan prasarana di sekolah. Hadiah-hadiah ini bisa berasal dari murid, guru atau staf lainnya, BP3, penerbit, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Adapun bentuk dan jumlahnya terserah kepada pihak-pihak yang akan menyumbang. Untuk memperoleh hadiah atau

sumbangan banyak tergantung kepada kemampuan sekolah menjalin hubungan dengan sumber-sumber yang dapat dijadikan tempat meminta hadiah atau sumbangan.

- c. Tukar menukar. Untuk memperoleh tambahan perlengkapan sekolah, pengelola sekolah dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pengelola sekolah lain. Kerjasama tersebut berupa saling menukar perlengkapan yang dimiliki.
- d. Meminjam. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bisa dilakukan dengan meminjam kepada pihak-pihak tertentu.

Jadi di dalam pengadaan sarana dan prasarana perlu kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dan dari segi peralatannya perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas barang. Sehingga sarana dan prasarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

3) Pendistribusian

Di dalam proses pendistribusian perlengkapan sekolah harus didasari dengan sikap amanah (dapat dipercaya), sehingga di dalam proses pendistribusian akan berjalan dengan baik. Di dalam ilmu pendidikan menurut Ibrahim Bafadhal (2008:38) bahwa pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pendistribusian yaitu ketepatan barang itu disampaikan (baik jumlah maupun jenisnya), ketepatan sarana penyimpanan, serta ketepatan kondisi barang yang akan disalurkan. Dalam kaitannya dengan itu, diperbolehkan adanya penyusunan alokasi pendistribusian. Dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan alokasi pendistribusian barang-barang yang telah diterima oleh sekolah dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan setiap bagian dengan melihat kondisi, kualitas serta kuantitas barang yang ada. Dengan semakin jelasnya alokasi pendistribusian maka akan lebih mudah untuk melaksanakan dan dikontrol setiap saat. Menurut Bafadal (2008:39) mengungkapkan bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan alokasi pendistribusian, yaitu:

a) Penerimaan barang

Penerimaan barang yaitu orang yang menerima barang dan sekaligus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan daftar barang yang diterima.

b) Waktu penyaluran barang

Waktu penyaluran barang harus disesuaikan dengan kebutuhan barang tersebut, terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar serta aktivitas pendidikan lainnya.

c) Jenis barang yang disalurkan

Untuk mempermudah pengelolaan perlengkapan disekolah ada beberapa cara dalam membedakan jenis perlengkapan yang ada disekolah, misalnya, dengan melihat penggunaan barang tersebut.

d) Jumlah barang yang didistribusikan

Dalam pendistribusian, agar keadaan barang yang sudah disalurkan dapat diketahui secara pasti dan dapat dikontrol, perlu ada ketegasan jumlah barang yang disalurkan.

Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam masa pendistribusian yaitu asas ketetapan, asas kecepatan, asas keamanan, dan asas ekonomis. Namun apabila terjadi sistem pendistribusian tidak langsung, maka barang-barang yang perlu disiapkan perlu mendapatkan pengawasan secara efektif dengan dibuatkan kartu stok baru.

Selain didasari dengan sikap amanah didalam pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan dapat ditegaskan bahwa pendistribusian barang pada dasarnya terdapat dua sistem, yaitu sistem langsung dan sistem tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung berarti barang-barang yang sudah diterima langsung disalurkan kepada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. sedangkan sistem pendistribusian secara tidak langsung adalah barang yang sudah diterima dan diinventariskan tidak

secara langsung disalurkan, melainkan dengan melalui proses penyimpanan terlebih dahulu.

4) Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan untuk kepentingan pembelajaran dengan sikap tanggung jawab yang tinggi. Dari segi penggunaan terutama penggunaan sarana atau perlengkapan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggunaan barang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Dalam penggunaan barang habis pakai harus secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan pada tri wulan sekali. Sedangkan dalam penggunaan barang tidak habis pakai, maka akan dipertanggung jawabkan pada periode satu tahun sekali.

Dalam hal penggunaan juga terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Bafadal (2003:42), yaitu:

- a) Prinsip efektifitas, berarti semua pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam rangka untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Prinsip efisiensi, berarti semua pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan cara hemat dan berhati-hati sehingga semua sarana dan prasarana yang ada tidak cepat habis, rusak, ataupun hilang .

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sarana sekolah harus bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya secara optimal dan penuh tanggung jawab, serta manfaat dari penggunaan sarana sekolah atau alat bantu belajar dalam proses belajar dan mengajar harus dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pendidikan.

5) Pemeliharaan

Pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam kegiatan baik dan berfungsi dengan baik juga. Kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan ukuran keadaan barang dengan penuh kehati-hatian, bila dilakukan setiap hari, secara berkala atau jangka waktu tertentu sesuai dengan petunjuk penggunaan. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh pemegangnya atau penanggungjawabnya. Pemeliharaan bisa juga dengan memanggil tukang atau ahli servis. dalam hal ini pemeliharaan mencakup segala daya dan upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar sarana fasilitas tetap dalam keadaan baik.

Menurut Bafadal (2008:49) ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah jika ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

a) Ditinjau dari sifatnya

- (1) Pemeliharaan yang bersifat pengecekan.
- (2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan.
- (3) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan.

(4) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat.

b) Ditinjau dari waktu perbaikan

(1) Pemeliharaan sehari-hari.

(2) Pemeliharaan berkala.

Pemeliharaan sangat penting dilakukan agar sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tidak mudah rusak. Pemeliharaan bisa dilakukan hanya sebagai suatu usaha pencegahan agar sarana dan prasarana yang ada bisa lebih tahan lama karena pada dasarnya setiap barang pada akhirnya akan mengalami kerusakan.

6) Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini harus disediakan instrument administrasi antara lain buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventaris, buku golongan inventaris buku bukan inventaris, buku stok barang. Secara definitif inventarisasi menurut Sulistyorini (2009:123) merupakan "pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur menurut ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku".

Proses inventarisasi harus dilakukan agar tercipta ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudah dalam pemeliharaan barang. Lebih lanjut inventarisasi ini dapat menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan sekolah.

7) Penghapusan

Bila besarnya biaya rehabilitasi sesuatu barang inventaris telah tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya bila biaya rehabilitasinya terlalu besar sedang daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Menurut Hamiyah (2015:136) penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Sedangkan menurut Sulistyorini (2009:125) penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, penghapusan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak akan di keluarkan dalam daftar inventarisasi.

4. Konsep Sarana Prasarana Olahraga di Sekolah

Istilah sarana adalah terjemahan dari “*facilities*” yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu (usaha atau pembangunan). Dalam olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah dan memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen, salah satu sifat tersebut adalah susah untuk dipindahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disebut beberapa contoh dari prasarana olahraga ialah ; lapangan bola basket gedung olahraga, lapangan atletik, lapangan sepak bola dan lain-lain. Gedung olahraga merupakan prasarana multi fungsi yang dapat digunakan sebagai prasarana pertandingan bola voli, prasarana pertandingan bulu tangkis dan lain-lain. Sedangkan stadion atletik didalamnya termasuk lapangan lompat jauh, lapangan lempar cakram, lintas lari dan lain-lain. Seringkali stadion atletik dipakai sebagai prasarana pertandingan sepak bola yang memenuhi syarat pula. Contohnya stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Semua yang disebutkan di atas adalah contoh-contoh sarana olahraga dengan ukuran standart, tetapi pendidikan jasmani seringkali hanya dilakukan di halaman sekolah atau di sekitar taman. Hal ini disebabkan karena kondisi sekolahsekolah saat sekarang hanya sedikit yang memiliki prasarana dengan ukuran standart. Pengertian prasarana bukan hanya terbatas pada hal-hal yang

terkait dengan arena kegiatan olahraga saja, tetapi segala sesuatu di luar sarana yang ikut memperlancar jalannya aktifitas olahraga juga disebut prasarana (Sagala,2003: 43). Tujuan sarana dan prasarana diadakan adalah untuk memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan program lain dalam pendidikan jasmani.

Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1) Peralatan/ *apparatus*

Peralatan adalah sesuatu yang digunakan untuk olahraga, contoh : palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda dan lain-lain.

2) Perlengkapan/ *device*

- Suatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, misal : net, bendera, garis batas dan lain-lain.
- Suatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki, misalnya ; bola, raket, pemukul dan lain-lain.

Di dalam pendidikan jasmani, sarana sederhana dapat digunakan untuk pelaksanaan materi pelajaran pendidikan jasmani yang tentunya dalam bentuk permainan, misalnya bola plastik, bola kasti, bola tennis, kardus bekas, potongan bambu dan lain-lain.

Pada prasarana yang dipakai dalam kegiatan olahraga pada masing-masing cabang olahraga memiliki ukuran yang standard. Akan tetapi bila cabang olahraga tersebut dipakai sebagai materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan, sarana yang digunakan bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut ini standar sarana dan prasarana olahraga untuk sekolah dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Bermain/Berolahraga, yaitu:

- a) Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b) Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m²/ peserta didik. Untuk luas satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m². Di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga ukuran 20 m x 15 m.
- c) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- d) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

- e) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- f) Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

Tabel 2.1. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Berolahraga di Sekolah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Peralatan bola voli.	1 set/sekolah	Minimum 6 bola
2	Peralatan sepak bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola
3	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat.
4	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet dan bak loncat.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

B. Penelitian Terdahulu

Wirawan (2010) melakukan penelitian dengan judul *Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dalam Pelaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Dabin IV Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian memperlihatkan keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD Negeri se-Dabin IV Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun pelajaran 2009/2010 dikarenakan kemampuan sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana mata

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan relatif terbatas. Kondisi ekonomi sekolah yang melemah menyebabkan sekolah sulit untuk dapat menambah sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Secara umum sumber pendanaan sekolah adalah dana operasional sekolah dari pemerintah daerah. Pos-pos yang harus dibiayai dari dana tersebut relatif banyak sehingga perlu adanya pemerataan. Bukan hanya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tetapi mata pelajaran lain juga membutuhkan dana pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Perlu diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan relatif lebih besar dibanding mata pelajaran lain sehingga dengan keterbatasan dana akan memberatkan sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tersebut secara lengkap. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang ideal yang meliputi cabang olahraga pokok atau wajib dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD se-Dabin IV Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Dwi Saputro (2014) melakukan penelitian dengan judul Survei Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan

Selopampang Kabupaten Temanggung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey. Berdasarkan hasil penelitian survei sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD Negeri se-Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD Negeri se-Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, terdapat 1 SD yang masuk dalam kategori kurang sekali dengan perolehan persentase 8,3%. Terdapat 3 SD masuk dalam kategori kurang dengan persentase 25%. Dalam kategori sedang terdapat 3 SD dengan persentase sebanyak 25%. Masuk dalam kategori baik terdapat 4 SD dengan perolehan persentase sebanyak 33,3%. Dan 1 SD masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan persentase sebanyak 8,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan jasmani berada pada kategori baik sebesar 33,3%.

Angga Dewi (2016) melakukan penelitian dengan judul *Kesesuaian Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Olahraga) Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Prambanan Sleman*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Berdasarkan hasil analisis data, jumlah persentase tingkat kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMP se-Kecamatan Prambanan Sleman berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional no 24 tahun 2007 adalah 62,68%. Akan tetapi, ketersediaan ini belum didukung dengan standar tempat dan pendukung yang layak sesuai dengan rasio

yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan bahwa SMP se-Kecamatan Prambanan Sleman memiliki ruang bebas yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Ruang bebas tersebut mampu dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah diantaranya untuk bermain dan olahraga. Sekolah pada umumnya memprioritaskan beberapa sarana dan prasarana tertentu, seperti prioritas pada sarana dan prasarana yang lebih ekonomis. Sedangkan pada jenis sarana dan prasarana tertentu seperti lapangan dan beberapa jenis untuk pembelajaran senam, atletik, dan lain-lain tidak dimiliki. Seluruh area bebas pada setiap sekolah digunakan untuk kegiatan bermain sedangkan 7 sekolah menggunakannya untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Ruang bebas yang dimiliki oleh SMP se-Kecamatan Prambanan Sleman belum sepenuhnya memenuhi standar yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Penataan ruang juga berpengaruh terhadap pembelajaran pendidikan jasmani. Terdapat beberapa sekolah yang memfungsikan ruang bebas untuk kegiatan berolahraga mengganggu kegiatan pembelajaran dikelas, dan menggunakan ruang bebas sebagai tempat parkir di beberapa sekolah, masih terdapat pohon yang mengganggu kegiatan berolahraga, saluran air dan drainase yang kurang baik. Untuk kepemilikan sarana dan prasarana olahraga seperti bola voli hanya 5 sekolah yang memenuhi rasio minimum. Bola sepak 4 sekolah dan bola basket hanya 2 sekolah yang sesuai jumlahnya dengan ketentuan peraturan menteri pendidikan nasional no 24 tahun 2007. Terdapat satu sekolah yang belum mempunyai lapangan basket, dan ada

pula lapangan untuk kegiatan berolahraga meminjam lapangan umum. Dalam penelitian ini terdapat satu sekolah yang tidak mempunyai sama sekali perlengkapan atletik dan senam. Menurut peraturan menteri pendidikan nasional no 24 tahun 2007 sekolah harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan jasmani sebagai yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 merupakan kendala dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Faktor pemenuhan sarana dan prasarana juga dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pengadaan perlengkapan olahraga yang memadai.

Perbedaan penelitian yang diungkapkan di atas dengan penelitian ini adalah jika penelitian Teguh Wirawan (2010) lebih difokuskan pada Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Untuk Imam Dwi Saputro (2014) lebih difokuskan pada survey ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani, maka penelitian ini difokuskan pada penilaian atau evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan. Sedangkan Anis Angga Dewi (2016) lebih difokuskan kepada Kesesuaian Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Olahraga) berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, maka penelitian ini difokuskan pada penilaian atau evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan.

Berdasarkan uraian di atas, secara lengkap, rangkuman studi terdahulu dan posisi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.2. Posisi Riset “Evaluasi Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang” diantara riset-riset terdahulu

No	Judul/Tahun Penelitian/Lokasi	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset ini
1	Teguh Wirawan (2010) dengan judul “Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dalam Pelaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Dabin Iv Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2009 / 2010”	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD Negeri se-Dabin IV Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun pelajaran 2009 / 2010 dikarenakan kemampuan sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan relatif terbatas. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang ideal yang meliputi cabang olahraga pokok atau wajib dalam	Jika penelitian Teguh Wirawan (2010) lebih difokuskan pada Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.

		pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD se-Dabin IV Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	
2	Imam Dwi Saputro (2014) dengan judul "Survei Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung"	Sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD Negeri se-Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, terdapat 1 SD yang masuk dalam kategori kurang sekali dengan perolehan persentase 8,3%. Terdapat 3 SD masuk dalam kategori kurang dengan persentase 25%. Dalam kategori sedang terdapat 3 SD dengan persentase sebanyak 25%. Masuk dalam kategori baik terdapat 4 SD dengan perolehan persentase sebanyak 33,3%. Dan 1 SD masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan persentase sebanyak 8,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan jasmani berada pada kategori baik sebesar 33,3%	Jika Imam Dwi Saputro (2014) lebih difokuskan pada survey ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani, maka penelitian ini difokuskan pada penilaian atau evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan.
3	Latifah Anis Angga Dewi (2016) dengan judul "Kesesuaian	Jumlah persentase tingkat kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan jasmani	Latifah Anis Angga Dewi (2016) lebih difokuskan kepada

	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Olahraga) Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Prambanan Sleman Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007”	di SMP se-Kecamatan Prambanan Sleman berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional no 24 tahun 2007 adalah 62,68%. Akan tetapi, ketersediaan ini belum didukung dengan standar tempat dan pendukung yang layak sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan	Kesesuaian Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Olahraga) berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, maka penelitian ini difokuskan pada penilaian atau evaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan
--	---	--	---

Sumber: Peneliti, 2018.

C. Kerangka Pemikiran

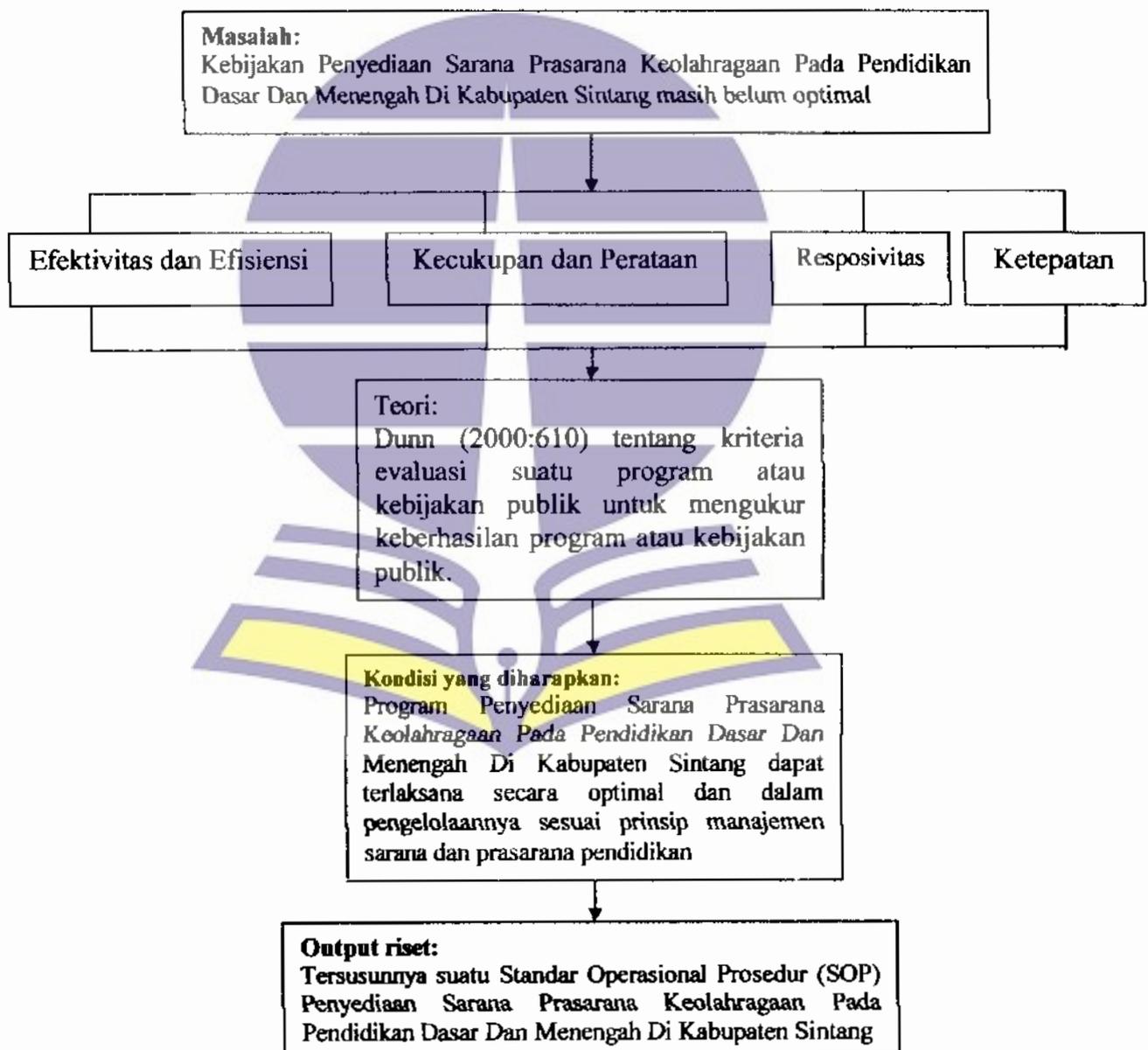
Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang. Sarana dan prasarana olahraga adalah bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan. Tapi realitanya sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pendidikan masih belum memadai. Prosedur penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang selama ini hanya sebatas pengadaan dan distribusi saja. Sementara untuk penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, serta pengawasan belum dilakukan. Selain itu,

penetapan jenis sarana dan prasarana keolahragaan belum memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Prosedur seperti itu tentunya perlu dilakukan perbaikan. Di Kabupaten Sintang ketersediaan sarana prasarana olahraga di lembaga pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga masih belum memadai.

Fenomena permasalahan terkait dengan masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 disebabkan antara lain masih belum optimalnya pengelolaan program penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kecendrungan yang dilakukan selama ini adalah kegiatan dilakukan hanya sebatas pengadaan dan distribusi saja. Sementara untuk penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, serta pengawasan belum dilakukan. Penetapan jenis sarana dan prasarana keolahragaan belum memperhatikan kondisi lingkungan sekolah, sehingga banyak sarana dan prasarana keolahragaan justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau justru tidak dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2000:610) tentang kriteria evaluasi suatu program atau kebijakan publik untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yang meliputi efektivitas dan efisiensi, kecukupan dan pemerataan, responsivitas serta ketepatan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Penelitian

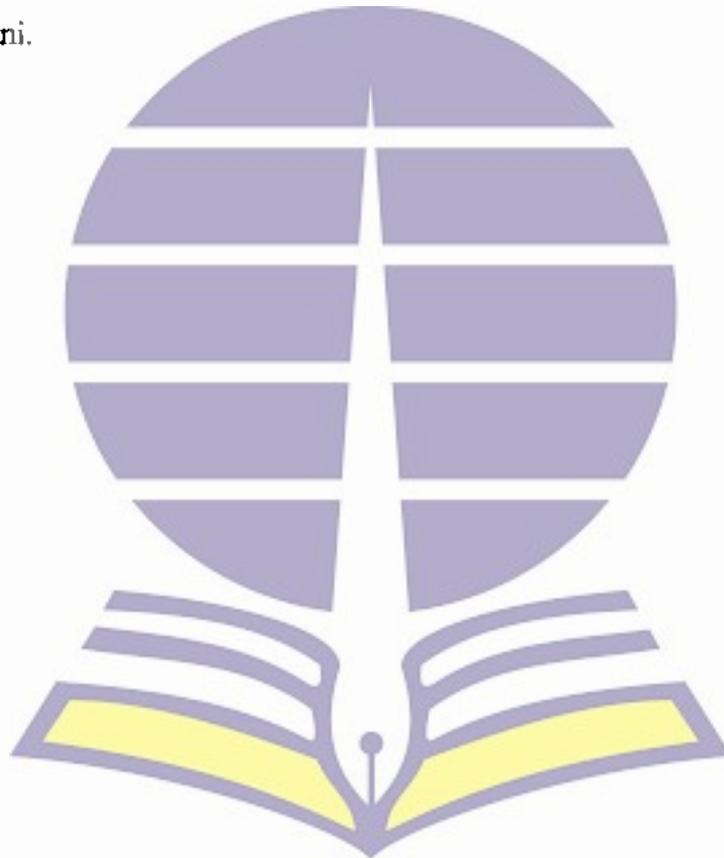


Sumber: Peneliti, 2019.

D. Operasionalisasi Konsep

1. Evaluasi kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana tujuan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang dapat dicapai.
2. Efektivitas adalah hasil guna kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah ditetapkan.
3. Efisiensi adalah usaha diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Kecukupan adalah kesesuaian metoda yang dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Perataan adalah keadilan dalam distribusi Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Responsivitas adalah tanggapan atas penerapan kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Ketepatan adalah kelayakan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

9. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran
10. Sarana Prasarana Olahraga di Sekolah adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengevaluasi Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang. Pendekatan evaluasi dimaksud dari aspek proses Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sintang. Gambaran Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang, dapat dilihat melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung, bisa juga dilakukan melalui ucapan subjek secara tertulis (wawancara) . Data dan informasi dari subjek secara mendalam dan komprehensif tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata (verbal), bukan angka (kuantitatif statistik) (Strauss, 1990: 23). Penelitian ini juga mirip yang digambarkan oleh Bogdan dan Taylor (1975: 40) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti .Bogdan dan Taylor, (1975:37)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan mendalami permasalahan pada kasus tertentu, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir, tetapi hanya berlaku pada tempat dimana kasus tersebut terjadi. Oleh sebab itu penelitian dilakukan pada SD Negeri 7 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh di lapangan penelitian dan dari orang-orang yang dianggap representatif dan dipilih secara purposif sehingga bisa diperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Mereka yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
- b. Pejabat struktural yang menangani Program Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
- c. Kepala Sekolah dan guru pendidikan jasmani pada SD Negeri 7 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

Sumber dan informan di atas dipilih dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dipilih karena mereka terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi

Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

- b. Unsur Kepala Sekolah dan guru pendidikan jasmani dipilih karena mereka sebagai pengguna (user) dari Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah literatur, sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini. Diantara dokumen dimaksud antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Bermain/Berolahraga, Profil Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2018, Laporan Tahunan Sekolah dan sebagainya.

C. Instrumen Penelitian

Data dan informasi yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah data yang kaya dan mendalam, tidak sekadar mengungkap hal-hal permukaan saja tetapi juga apa yang ada di balik permukaan. Oleh sebab itu maka instrumen yang cocok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Agar data dan informasi yang diperoleh berkualitas maka peneliti menggunakan beberapa alat kelengkapan antara lain : (1) Pedoman wawancara, berisi daftar pertanyaan terbuka yang merupakan penjabaran dari fokus penelitian, selanjutnya (2) Pedoman observasi

yang berisi rumusan item pengamatan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi, tempat penelitian dilakukan. dan (3) Catatan dokumen, berupa pengumpulan data sekunder yang tertulis menyangkut tempat atau lokasi penelitian dilakukan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan instrument, khususnya pedoman wawancara dan daftar wawancara sebagaimana digambarkan oleh Bungin (2001:12) adalah : (1) Merumuskan fokus dan deskripsi fokus penelitian; (2) Membuat tabel matriks pengembangan instrument yang meliputi : rumusan masalah, fokus masalah, indikator masalah, deskripsi indikator, sumber data, dan nomor/butir/item pertanyaan; dan (3) Membuat daftar pertanyaan dengan berpedoman pada deskripsi fokus masalah penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi dan wawancara mendalam, serta dokumentasi.

a. Observasi

Observasi (*observation*) adalah pengamatan dan pencatatan yang sistimatis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi, tempat penelitian dilakukan.. Observasi menggunakan pedoman observasi yang berisi rumusan item pengamatan dan digunakan untuk menetapkan aspek-aspek apa saja yang perlu diteliti terkait

dengan Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

b. Wawancara

Wawancara seperti dikemukakan oleh Bungin (2001:12) dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang secara langsung, dan orang dimaksud representatif memberi keterangan tentang masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara, Pedoman wawancara diadakan untuk menghindari kemungkinan biasnya data-data yang dibutuhkan sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disamping itu digunakan juga wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara informal, digunakan bersamaan dengan observasi. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan guide tertentu. Dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dirasakan. Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian maka wawancara diadakan terhadap unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang serta pihak sekolah yang diteliti.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh data dan informasi sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh di lapangan. Penelusuran dokumen (*document tracking*) mencakup dokumen yang terkait

dengan Program Penyediaan Sarana Prasarana Keolahragaan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

Pengabsahan data bermakna sebagai suatu proses pertanggung jawaban kebenaran dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*), teknik pengabsahan data sering dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus, kecukupan referensi, pengecekan anggota, uraian rinci dan *membercheck*. Teknik ini berguna untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh di lapangan betul-betul akurat dan memenuhi kriteria keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan keterkonfirmasi (*confirmability*).

a. Perpanjangan keikutsertaan.

Teknik ini dilakukan pada saat peneliti sedang di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan : 1) Membatasi gangguan dan dampak peneliti pada konteks, 2) Membatasi kekeliruan peneliti, 3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut peneliti agar berada di lapangan dalam waktu yang cukup panjang

dalam mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin terjadi, terutama distorsi pribadi, lebih dari itu perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Cara ini dilakukan melalui observasi secara terus menerus terhadap objek yang diteliti sampai lebih memahami gejala dan peristiwa secara mendalam sampai tidak ada gejala baru atau informasi baru yang muncul pada objek penelitian. Bahkan kalau terjadi pengembangan baru yang menyebabkan distorsi data, maka peneliti akan terus memperpanjang waktu penelitian. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

c. Uji triangulasi

Triangulasi data dilakukan untuk menjaga jangan sampai disesatkan dalam wawancara dengan cara peneliti mengecek (bertanya lagi). Perpanjangan keikutsertaan, selain berarti tinggal dilatar dan berinteraksi lebih lama untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan subjek (*rapport*) juga untuk menguji secara terus menerus ketidak benaran data atau informasi yang

diakibatkan oleh distorsi, baik distorsi dari peneliti sendiri (misalnya: menjadi asing, minder atau *overacting* dilapangan), maupun distorsi dari informan (seperti memberi informasi hanya sekedar menyenangkan peneliti, berdusta atau tidak, berpura-pura atau tidak, menipu atau tidak). Ketekunan pengamatan bermaksud melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti dan berkesinambungan (Miles, 1984). Pengabsahan data secara triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan sumber, metode, dan waktu.

1) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan me-recek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Hal ini bisa dilakukan melalui cara : a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu., d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti orang biasa orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan dan sebagainya, e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

2) Triangulasi dengan metode. yaitu triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu informasi yang sama, misalnya observasi, wawancara dan studi dokumentasi. (Patton, 1987:329)

3) Triangulasi dengan waktu, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan teknik waktu yang berbeda pada orang yang sama, membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang suatu penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang di peroleh, teknik yang dipergunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Yaitu memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data yang disajikan melalui kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif. Sedangkan untuk mengembangkan analisis, penulis menggunakan cara berpikir deduktif yaitu menguraikan dari hal-hal umum baru kemudian pada kesimpulan yang khusus.

